

UANG DAN BUDAYA UTANG DI EKS-KARESIDENAN BESUKI DALAM LINTAS SEJARAH

Sri Ana Handayani

Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember

ABSTRACT

The research explore the views, knowledge, and beliefs of the Indonesian people on money, debt, and credit. This study tries to explain the Javanese's and Madurese's conception shift about money and debt in their economical life, especially (1) The conception of the Madurese and Javanese people on money and debt culture. (2) The conception shift in using of money and debt culture. (3) The factors that is influencing conception shift about money and debt culture. The research employs of historical methods. The research material here include both primary and secondary sources. Primary sources collection by interviews (the oral history technique). Secondary sources consist of published materials, research reports, and newspaper, which are relevant to the subject under consideration. The research concludes that there are same conception among the two ethnic group on money, and debt cultural in the former Besuki Residency. The money used for economic, social, politics, and religious. There for, the active role of government is important to direct the people to adopt the formal credit pattern of life by involving prominent formal and informal figures.

Keywords : conception, money, debt culture.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi pandangan, pengetahuan, dan keyakinan masyarakat Indonesia pada uang, utang, dan kredit. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana pergeseran konsepsi orang Jawa dan Madura tentang uang dan utang dalam kehidupan ekonomi mereka, terutama (1) Konsepsi-orang Madura dan Jawa pada uang dan budaya utang. (2) Bagaimana perubahan konsepsi mereka dalam menggunakan uang dan budaya utang. (3) Apa faktor untuk mengubah konsepsi mereka pada budaya utang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Bahan penelitian di sini termasuk sumber primer dan sekunder. Koleksi utama sumber dengan observasi dan wawancara (teknik sejarah lisan). sumber sekunder terdiri dari bahan diterbitkan, laporan penelitian, dan koran, yang relevan dengan subjek yang sedang dipertimbangkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada konsepsi yang sama di antara dua kelompok etnis pada uang, dan utang budaya di bekas Karesidenan Besuki. Uang yang digunakan untuk ekonomi, sosial, politik, dan agama. Ada untuk, peran aktif pemerintah sangat penting untuk mengarahkan orang-orang untuk mengadopsi pola kredit formal hidup dengan melibatkan tokoh-tokoh formal dan informal yang menonjol.

Kata kunci: konsepsi, uang, budaya utang.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, peran uang, utang, dan kredit sangat penting dalam pembangunan. Baik masyarakat maupun pemerintah tidak terlepas dari peran uang dan utang untuk membangun berbagai fasilitas, baik yang berkaitan dengan kebutuhan sandang maupun pangan. Dalam paradigma ekonomi uang dipandang sebagai sesuatu yang anonim dan netral secara sosial, sehingga kebijakan ekonomi dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh wilayah diseragamkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil selama masa Orde Baru belum dapat mencapai tujuan yang utama yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, fenomena uang dan utang perlu dikaji dari berbagai disiplin ilmu agar mendapat pemahaman tentang pola perilaku ekonomi masyarakat secara komprehensif.

Mengapa uang menjadi penting terutama dalam kehidupan manusia modern? Sejak ditemukannya uang sebagai alat tukar di berbagai wilayah dunia, uang telah berperan besar dalam mengubah perilaku budaya manusia. Uang merupakan instrumen yang cukup penting baik sebagai sarana transaksi, komunikasi, bahkan sebagai sarana pengakuan status sosial seseorang.

Masyarakat Indonesia yang majemuk, menjadi masyarakat yang unik termasuk dalam cara memandang uang. Di satu sisi, masyarakat modern memandang uang sebagai fenomena pertukaran yang mengandung tiga hal yang penting, yaitu uang sebagai alat pembayaran, alat standar, dan alat pertukaran (Damsar, 2006:45). Uang sebagai alat pembayaran berkaitan pelaksanaan kewajiban terhadap objek-objek yang dapat dipindahkan kepada pihak lain. Uang sebagai standar menunjuk kepada penyamaan sejumlah jenis barang berbeda untuk tujuan-tujuan tertentu yang berpijak pada pengertian dana dan neraca. Adapun uang sebagai sarana pertukaran merupakan hal yang berkaitan dengan pembayaran secara tunai atau langsung. Dalam masyarakat modern transaksi di-

lakukan secara langsung. Djojohadikusumo (1989) berpendapat bahwa uang sebagai alat bayar, alat tukar, dan alat hitung. Dengan demikian, masyarakat modern yang cenderung menjadi masyarakat kapitalis memandang pasar sebagai institusi yang superior terhadap institusi sosial lainnya yang berjalan atas logika *self regulating market* sehingga keberadaannya menjadi determinan dalam seluruh proses sosial. Di sisi lain, masyarakat yang masih hidup dengan sistem ekonomi agraris yang tinggal di pedesaan, uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang juga berkaitan dengan kehidupan sosial budaya. Fenomena uang berhubungan dengan fenomena sosial, budaya, agama, politik, bahkan religi (Adimihardja, 1983). Dengan demikian, uang tidak dipandang sebagai sesuatu yang seragam. Kedua hal inilah yang pada dasarnya membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan menjadi sulit diterapkan di lapangan.

Kajian yang berkaitan dengan permasalahan uang dan utang di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonial, terutama awal abad ke-20. Masyarakat bumiputera terutama di pedesaan mulai menjadi perhatian pemerintahan kolonial sejalan dengan politik kesejahteraan. Pakar yang membahas tentang kehidupan masyarakat bumiputera antara lain O.P Basseling (1919), J.C.W. Cramer (1929), Boeke (1929). Pada umumnya mereka meneliti tentang faktor penyebab kemiskinan masyarakat bumiputera, dari aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Kajian mereka pada umumnya berdasarkan kaca mata kolonial, di mana faktor yang menyebabkan kemiskinan berasal dari mentalitas bumiputera yang lemah dalam berwirausaha, perilaku ekonomi bumiputera yang cenderung tradisional, dan malas. Kajian akademis dari Djojohadikusumo (1987) tentang kredit bagi masyarakat pedesaan (kajian ekonomi mikro) yang memaparkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat bumiputera, sirkulasi keuangan, kebutuhan kredit, serta penanganan kredit oleh pemerintah Hindia Belanda, memberi gambaran tentang

ketimpangan perimbangan kekuatan perekonomian golongan produsen yaitu kulit putih dan Cina dengan golongan pelaku ekonomi yaitu bumiputera. Ketimpangan inilah yang mengakibatkan mayoritas bumiputera terjatuh dalam utang piutang tradisional yang bunganya tinggi. Pada umumnya kajian-kajian pakar ekonomi lemah akan wawasan historis dan memunculkan berbagai permasalahan dewasa ini. Ada beberapa kajian dari sudut sosial budaya yang berkaitan dengan budaya kredit dewasa ini, seperti kajian Nugroho (2002) tentang uang, rentenir, dan utang piutang di Kabupaten Bantul. Ia mengatakan bahwa kredit yang dijalankan oleh para rentenir atau kredit informal telah ikut menggerakkan roda perekonomian Bantul.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana persepsi orang Madura dan Jawa terhadap uang dan budaya utang; (2) apakah ada perubahan dalam pemahaman konsep uang dan budaya utang; (3) faktor apa yang menyebabkan terjadi pergeseran budaya utang.

Dengan mengkaji permasalahan ini, maka tulisan ini ditujukan untuk: (1) mengkaji tentang persepsi masyarakat Madura dan Jawa tentang uang dan budaya utang secara diakronis; (2) mengungkapkan pergeseran budaya utang; (3) mengungkap faktor penyebab pergeseran persepsi masyarakat terhadap uang dan utang.

Tulisan ini, selain mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap uang dan budaya utang era kolonial, juga mengkaji hal yang sama terhadap masyarakat Madura dan Jawa di Jawa Timur dewasa ini, khususnya eks-Karesidenan Besuki, dengan alasan: *pertama*, daerah eks-Karesidenan Besuki merupakan daerah tanaman ekspor yang cukup penting di Daerah Jawa Timur pada era kolonial Belanda. Setelah merdeka, daerah eks-Karesidenan Besuki juga merupakan penyangga ekonomi untuk daerah Jawa Timur dewasa ini. *Kedua*, dewasa ini masyarakat Jawa merupakan masyarakat

dengan jumlah terbesar di Jawa Timur, adapun masyarakat Madura kedua terbesar setelah orang Jawa, dianggap merupakan cerminan dari sebagian masyarakat Indonesia yang sedang menuju kepada era ekonomin pasar.

Diargumentasikan bahwa masyarakat yang melek keuangan akan meningkatkan produktivitas dan dapat bersaing menuju kemandirian ekonomi. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan atau penggunaan uang masih belum maksimal ke arah hal yang produktif, sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedesaan dan perkampungan masih bergelut dengan kebutuhan dasar, belum memikirkan tabungan untuk masa depan. Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, maka meningkatkan melek keuangan masyarakat menjadi prasyarat penting.

Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, apabila kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka solusi yang diambil adalah berutang, baik kepada saudara terdekat, tetangga, atau kepada lembaga keuangan resmi maupun tidak resmi. Masyarakat memahami utang secara sosiologis dan secara ekonomis. Pemahaman utang yang berkaitan dengan ekonomi berbeda dengan utang sosial budaya, akan tetapi keduanya mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat pada umumnya. Untuk itu perlu dikaji lebih jauh pemahaman tentang utang berdasarkan pandangan masyarakat.

Kajian mengenai uang dan utang dipandang dari sudut budaya menjadi sangat penting, karena ada pertimbangan praktis dan teoretis. Secara praktis kajian historis yang berkaitan dengan pandangan dan penggunaan uang, serta sistem utang yang berlangsung masa lalu merupakan pelajaran berharga bagi masa kini, karena sejarah pun dapat berjalan ke depan. Bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin

melalui berbagai lembaga keuangan dapat lebih mengena kepada sasaran, bukan hanya sekedar untuk mengatasi ketertinggalan yang cenderung diabaikan oleh masyarakat yang menjadi subyek bantuan keuangan.

Dari sudut pandang teoretis, pengkajian yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap uang dan utang ini dapat memperkaya khasanah keilmuan, dan mempererat kajian sejarah dengan ilmu sosial lain sehingga dapat meningkatkan daya ekplanasi sejarah. Secara teoretis, Boeke (1926) sudah mengeluarkan pendapatnya tentang Dualisme Ekonomi sekitar awal abad ke-20. Boeke mengkategorisasikan struktur ekonomi Hindia Belanda dengan mengidentifikasi dikotomi yang tidak dapat dihilangkan antara perusahaan Barat dan kepentingan bisnis kolonial di satu pihak dengan ekonomi pribumi yang mencukupi kebutuhan sendiri di pihak lain. Menurut Boeke (1926), di Hindia Belanda terjadi perubahan transformasi sejalan dengan diselenggarakannya pembangunan infrastruktur jalan seperti jaringan kereta api, akan tetapi, infrastruktur ekonomi sebagian besar pribumi tetap tidak berubah karena para produsen pribumi bertahan dengan dasar tradisional mereka. Konteks tulisan Boeke bukan untuk didiskusikan dalam artikel ini, akan tetapi sebagai dasar untuk memahami pandangan masyarakat pribumi terhadap uang kolonial yang sudah dijadikan sebagai uang tunggal secara nasional di Hindia Belanda pada waktu itu. Untuk memahami pola perilaku ekonomi masyarakat yang agraris, maka teori Polanyi tentang tukar menukar dapat memberikan pemahaman tentang aspek diakronis perubahan pemahaman uang dan utang dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan riset sejarah, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut Gottschlak

(1986) tahapan dalam metode sejarah terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan pengumpulan sumber yang relevan dengan penelitian. Sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer karya tulis sejaman, tulisan pakar Hindia Belanda yang menyelidiki kemakmuran masyarakat bumiputera. Sumber sekunder yang dapat mendukung kajian ini berkaitan dengan masa kontemporer berupa wawancara dengan masyarakat berdasarkan prosedur sejarah lisan. Sumber sekunder berupa kajian-kajian para pakar yang berkaitan dengan tema kajian ini. Kritik digunakan untuk menentukan tingkat otentitas dan kredibilitas sumber.

Interpretasi merupakan langkah untuk menganalisis data serta menyusun argumentasi. Interpretasi sejarah mengenai uang dan juga utang dalam artikel ini dengan dasar interaksi dinamis ekonomi subsisten dan ekonomi pasar mempunyai konsekuensi penting bagi interpretasi sejarah. Tahapan historiografi merupakan tahapan penuangan argumentasi sebagai konstruk sejarah dalam bentuk narasi. Dalam riset sejarah, historiografi bukan hanya sekedar menyajikan tulisan yang bersifat deskriptif naratif, melainkan yang bersifat deskriptif analisis yang berkaitan dengan aspek prosesusual dan struktural (Kartodirdjo, 1986). Dalam hal ini, aspek prosesusual untuk menggambarkan dinamika penggunaan uang serta utang, adapun aspek struktural untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pergeseran penggunaan uang dan utang dalam masyarakat dalam kurun waktu yang berbeda. Untuk membangun, menganalisis, dan menjelaskan kajian ini, maka penulis menggunakan pendekatan antropologi ekonomi dan sosiologi uang. Pendekatan antropologi ekonomi untuk menjelaskan gejala sosial ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan tujuan penggunaan uang (*non commercial market*), adapun sosiologi uang untuk memahami penggunaan uang dalam lingkup sosial budaya masyarakat.

HASIL PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Bumiputera terhadap Uang

Sebelum VOC berniaga di Nusantara, setiap kerajaan tradisional sudah melakukan transaksi dagang dengan menggunakan uang. Setiap wilayah kerajaan tradisional memiliki mata uang sendiri. Menurut Reid (1993:96-97), awal abad ke-14 kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah menggunakan uang dalam sistem perdagangannya. Perdagangan di Nusantara menggunakan berbagai mata uang lokal. Di Jawa dikenal mata uang lokal *picis*, *kepeng*, *tail*, di Aceh dikenal mata uang *dirham*, di Malaka *calais* (Reid,1993). Mata uang yang beragam juga mempengaruhi nilai mata uang setiap wilayah, sehingga pada saat bangsa Eropa melakukan perdagangan di Nusantara mereka mengalami kesulitan dalam bertransaksi menentukan harga.

Keumitan mata uang dalam bertransaksi dagang yang dirasakan VOC dan pemerintah Hindia Belanda di wilayah Nusantara melahirkan ide untuk menggunakan mata uang tunggal. Gagasan ini dirumuskan oleh Van Imhoof pada tahun 1744. Van Imhoff mengadakan kesepakatan dengan Sunan Mataram, yaitu Pakubuwana I untuk mendirikan percetakan uang di Batavia, uang yang dicetak dalam bentuk dinar emas (*dirham Jawi*) dan dirham perak (Lombard,2005:149). Akan tetapi, percetakan ini tidak dapat berjalan dengan baik, kemudian ditutup.

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda gagasan mengenai mata uang tunggal untuk transaksi perdagangan di Nusantara kembali mencuat, karena terjadi dualisme penggunaan uang. Pemerintah melakukan transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan mata uang florin, sementara penduduk bumiputera menggunakan mata uang lokal dalam transaksi sehari-hari. Hal ini pemerintah beranggapan bahwa dalam transaksi ekonomi baik masyarakat maupun pemerintah harus menggunakan mata uang tunggal. Mata uang tunggal menjadi perhatian yang sangat penting bagi peme-

rintah. Pada tahun 1854, pemerintahan mengeluarkan mata uang tunggal, yaitu florin atau golden untuk bertransaksi, akan tetapi baru tahun 1930-an mata uang tunggal diberlakukan di seluruh Nusantara sebagai wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (Lombard,2005:201).

Pada saat ekonomi perkebunan mulai berjalan di Nusantara khususnya di Jawa, maka terjadi disparitas pemahaman uang antara pemerintah, pengusaha Eropa, dengan bumiputera. Pemerintah dan pengusaha Eropa terlibat dalam ekonomi dunia dengan komoditas eksportnya, mereka memandang uang sebagai alat bayar, tukar, dan alat ukur dalam transaksi ekonomi perdagangan internasional. Sementara bumiputera semakin terdesak dalam perekonomian lokal yang substantif. Masyarakat bumiputera melakukan transaksi perdagangan di tingkat lokal, produksi tanaman hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk komoditas ekspor. Bagi orang Eropa uang merupakan salah satu modal bagi pengembangan perusahaannya, sementara bumiputera menganggap tenaga kerja dan tanah (modal tidak bergerak) sebagai modal produksi. Di sinilah berkembang seperangkat praktek tukar menukar tenaga kerja, modal dalam bentuk tanah atau harta tidak bergerak, serta barang-barang konsumsi.

Kesadaran akan adanya dukungan terhadap mekanisme sosial yang berkaitan dengan pengerahan tenaga kerja, modal, serta sumber daya konsumsi merupakan ciri khas utama sifat gotong royong. Kerja sama berdasarkan perasaan yang tinggi akan nilai timbal balik setiap kerjasama. Secara tradisional di desa dikenal kerja sama dalam arti kerja kelompok dan timbal balik. Kerja sama kelompok, di mana masyarakat bekerja untuk kepentingan bersama, seperti bersih desa dan tugas kerja padat karya lainnya, sementara timbal balik berkaitan dengan beberapa keluarga secara pribadi yang secara bergantian mengerjakan apa yang pernah dilakukan oleh keluarga lain terhadap keluarganya, terutama hutang kerja yang harus dikembalikan dan berlaku bagi keluarga lainnya

(Geertz, 1987:169-170). Dari mekanisme sosial inilah, maka uang kurang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, warga desa secara sosiologis lebih menghargai prinsip timbal balik, solidaritas yang ditekankan kepada tenaga jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonominya. Sementara warga bumiputera di perkotaan era kolonial Belanda, sama-sama tidak dapat mengakses ekonomi modern, sehingga mereka tetap dalam ekonomi substantif dengan sistem budaya timbal balik secara tradisional.

Masyarakat bumiputera dalam bertransaksi ekonomi sehari-hari menggunakan uang lokal seperti uang kepeng, jarang yang memegang uang kantan, paling banyak hanya sekitar f 1 saja (Creutberg, 1987). Warung perancangan sudah ada tetapi masih sangat bersahaja, barang dijual hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari (Geertz, 1987). Kekayaan orang pedesaan disimpan dalam bentuk harta tidak bergerak, seperti tanah atau emas. Ternak ada tetapi merupakan tabungan untuk digunakan pada saat ada selamatan. Persepsi orang Eropa terhadap uang adalah sebagai alat transaksi ekonomi dan modal, sementara bumiputera masih mengandalkan modal tidak bergerak dalam transaksi ekonomi mengakibatkan bumiputera terkalahkan dalam persaingan perniagaan yang bersifat internasional (Creutberg, 1987).

Pada saat wilayah Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Jepang, terjadi kekacauan penggunaan mata uang. Pemerintah Jepang melarang uang *golden* dijadikan sebagai alat transaksi, sementara penggunaan uang Jepang belum dapat digunakan secara umum dalam transaksi ekonomi. Hal ini mengakibatkan permasalahan tersendiri dalam hal keuangan.

Pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaan, baru Indonesia mengeluarkan mata uang Indonesia untuk dijadikan sebagai alat transaksi ekonomi. Awal kemerdekaan, Uang Republik Indonesia atau ORI merupakan mata uang tunggal di Indonesia. Kondisi politik yang tidak stabil, mengakibatkan kekacauan politik, sosial, maupun

ekonomi. Masa Orde Baru berusaha untuk menstabilkan mata uang, dengan cara mengubah krus rupiah dengan mengkaitkan dengan dollar Amerika Serikat secara ketat. Uang republik Indonesia menjadi rupiah. Setelah krisis moneter tahun 1989 rupiah bergerak mengikuti pasar. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap uang dan utang tidak terlepas dari tradisi dan modernitas dari pola kehidupan ekonomi mereka.

Dari hasil kajian Masyarakat Madura dan Jawa dewasa ini, ternyata sebagian besar masyarakat pedesaan belum dapat melepaskan unsur-unsur tradisi yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya. Di era kemerdekaan ini, ternyata pandangan masyarakat terhadap uang pun tidak terlepas dari faktor sosiologis dan antropologis, di mana penggunaan uang tidak terlepas dari kebutuhan sosial selain untuk transaksi ekonomi.

Uang dan Perkreditan di Eks-Karesidenan Besuki

Secara geografis, eks-Karesidenan Besuki merupakan daerah yang berada disekitar wilayah Pedalaman dan ujung timur Pulau Jawa Timur, yang sekarang meliputi daerah Kabupaten Sitobondo, Bondowoso, dan Jember. Selama Pemerintahan Hindia Belanda, Karesidenan Besuki merupakan wilayah yang cukup penting, karena merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar, baik komoditas pertanian seperti beras, juga komoditas perkebunan tanaman ekspor seperti tembakau, kopi, dan tebu. Dalam hal ini, pemerintah Hindia Belanda mempunyai peranan penting dalam mengalokasikan semua sumber daya ekonomi Karesidenan Besuki. Pemerintah Hindia Belanda mempunyai peran penting dalam membuka Jember yang terisolasi, karena keberadaan wilayahnya berada di pedalaman wilayah Jawa Timur.

Pada tahun 1870 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Agraria, tujuannya untuk mengatur hak-hak properti di seluruh Nusantara. Selain itu, membuka peluang bagi kerjasama dan mengantarkan kepada keterlibatan lebih

lanjut perusahaan-perusahaan kapitalis Eropa dalam mengembangkan kekuatan bisnis mereka.

Liberalisme dianggap sebagai titik balik perekonomian pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah dan perusahaan swasta setidaknya memainkan peranan penting dalam membangun jaringan jalan dan komunikasi dalam rangka mensukseskan industri mereka. Mereka memperluas areal komoditas mereka, sehingga membuka peluang kerja bagi bumiputera sebagai buruh, juga memperkenalkan beberapa pembagian kerja di sektor pribumi sendiri, pemerintah, dan perusahaan swasta mengenalkan beberapa keahlian baru yang diperlukan petani pribumi untuk memperbaiki kualitas produk pertanian mereka yang memungkinkan produk-produk pertanian petani dapat dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi (Zed, 2002:304). Proses komoditasi bersamaan dengan komersialisasi, dan transformasi finansial menjadi lebih sering daripada sebelumnya. Uang menjadi bagian penting dalam bertransaksi.

Daerah Karesidenan besuki terutama wilayah pedalaman mulai terbuka dari isolasi perdagangan global, karena wilayah pedalaman seperti Jember dan Bondowoso mulai menjadi lahan perkebunan tanaman ekspor tembakau, yang mulai menjadi tanaman komoditas ekspor dan menguntungkan pengusaha swasta. Sejak dibukanya lahan perkebunan swasta, daerah pedalaman eks Karesidenan Besuki banyak di datangi oleh para migran yang ingin bekerja di perkebunan sebagai buruh atau tenaga profesional lainnya.

Sejak perkebunan-perkebunan dibuka oleh pihak swasta, maka tenaga kerja untuk membuka dan mengurus lahan perkebunan sangat diperlukan. Para pengusaha swasta berusaha untuk merekrut tenaga kerja bumiputera. Kompensasi kerja di perkebunan dengan upah. Dengan adanya upah, maka pedesaan mulai dimasuki oleh ekonomi uang. Uang menjadi bagian penting dalam bertransaksi ekonomi. Secara tidak langsung ekonomi rumah tangga pertanian berhubungan

secara dinamis dengan ekonomi pasar, sehingga secara tidak langsung tenaga kerja rumah tangga di desa berusaha untuk mencari keuntungan di berbagai peluang pendapatan non pertanian dan mengoptimalkan pendapatan sebagai penghidupan atas reaksi terhadap biaya yang semakin meningkat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat era liberalisme ini, akhirnya menjadi perhatian pemerintah sekitar awal abad ke-20. Bersamaan dengan penerapan politik etis, pemerintah mendata tingkat kesejahteraan penduduk Hindia Belanda ternyata, masyarakat bumiputera terutama yang berada di pedesaan hidupnya berada dalam kemiskinan (Van Laanen, 1987: Boeke, 1926; Cramer, 1929). Upah kerja sebagai buruh di perkebunan tidak dapat mengankat kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja, karena upah yang diterima masih kecil dibandingkan dengan biaya hidup sehari-hari (Creutberg, 1987). Biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan mengakibatkan masyarakat terjebak ke dalam pusaran utang piutang. Utang piutang bagi bumiputera berlangsung secara tradisional, melalui *mindring* yang mayoritas dikuasai oleh orang China, *ijon*, *tengkulak*. Perkreditan informal ini pada akhirnya dikenal sebagai kredit tradisional. Kredit tradisional dianggap merugikan peminjamnya karena bunga yang dikenakan sangat tinggi.

Baru pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial Belanda mulai memperhatikan kebutuhan perkreditan masyarakat dengan membentuk *Volkscrediet* atau kredit rakyat. Tujuannya agar rakyat dapat meminjam uang di perbankan (institusi kredit resmi), dengan bunga kecil, sehingga dapat dengan uang pinjaman tersebut masyarakat dapat meningkatkan produktivitas pertanian atau kerajinan. Sejak saat itulah masyarakat pedesaan mulai mengenal lembaga kredit modern.

Setelah Indonesia merdeka, baru pada masa Orde Baru perkreditan untuk rakyat menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kredit dengan bunga

lunak diusahakan untuk membantu masyarakat yang ingin meningkatkan produktivitas mereka, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi. Program pemerintah Orde Baru seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal), Kukesra (kredit Usaha Sejahtera), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dan sebagainya. Hanya saja program-program ini belum dapat mengentaskan kemiskina, karena respons masyarakat berbeda dalam menyikapi kredit tersebut. Ada beberapa yang dapat memanfaatkan peluang ini untuk kepentingan usaha mereka, akan tetapi ada juga yang pasif untuk menggunakan fasilitas pinjaman ini (Agusta, 2015).

Budaya Utang

Sejak masyarakat Nusantara terpuruk dalam perniagaan internasional, karena tersisihkan dari dunia perniagaan orang-orang barat, maka sistem ekonomi masyarakat beralih ke ekonomi agraris dengan budaya feodal. Dinamisasi masyarakat dagang sedikit-demi sedikit surut, bahkan di Jawa budaya feodal melahirkan budaya *adiluhung* yang memposisikan wirausaha menjadi tidak menarik, karena kelompok priyayi diberi status sosial tinggi, sementara pedagang status sosial menjadi wong cilik. Dunia wirausaha menjadi berubah dengan mentalitas priyayi yang menjauhi dunia kerja perdagangan. Sementara itu, modal tidak bergerak seperti tanah dan emas masih menjadi modal pasif, karena tuan tanah menjadi terbatas dalam permodalan. Hal ini berbeda dengan daerah Priangan di mana, tuan tanah Priangan berhasil mentransfer nilai Barat tentang modal bergerak yaitu uang sebagai modal perdagangan, sehingga jiwa wirausahanya lebih berkembang, bahkan dapat menyaingi pedagang Cina di Priangan (Svenson, 1989).

Motivasi masyarakat Madura dan Jawa datang ke daerah Karesidenan Besukli pada waktu itu dalam rangka mencari pekerjaan untuk memnuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, maka

dalam bermasyarakat di daerah baru tidak meninggalkan budaya yang sudah terinternalisasi sejak kecil. Pada masa kolonial Belanda Masyarakat Jawa dan Madura ditulis sebagai satu kesatuan administrasi dan kebudayaan, sehingga pemerintah kolonial dalam melaksanakan administrasi dan politik sama untuk kedua etnis ini. Padahal baik secara karakter maupun secara wilayah kedua etnis ini memiliki perberbedaan.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat mengenal berbagai prinsip yang intinya *guyub*. Nilai-nilai masyarakat Jawa dan Madura yang berkaitan dengan uang dan utang tidak lepas dari budaya *sungkan* dan *guyub, medit, mbabalidada, rukun*, tolong menolong, dan sebagainya. Pemahaman uang laku atau tidak laku dan penggunaan uang maupun utang juga dipengaruhi budaya.

Konsepsi Masyarakat Madura tentang Uang dan Utang

Jenis uang yang diketahui oleh masyarakat terutama di pedesaan adalah uang kertas dan logam, karena uang kertas dan logam yang sehari-hari digunakan untuk bertransaksi. Uang yang beredar di masyarakat masyarakat rata-rata sekarang uang kertas, karena dianggap praktis. Di pasar atau kembalian dari angkutan umum rata-rata kondisi uang kertas sudah lusuh tidak rapih dan kencang, karena perputaran uang kertas lebih cepat sementara penggantian uang kertas tidak cepat. Perpindahan dari satu tangan ke tangan lainnya tanpa ada tempat penyimpanan uang yang memadai mengakibatkan kondisi uang kertas lebih sering lusuh. Demikian juga dengan uang logam, kondisinya sudah tidak bagus, padahal perputaran uang logam jumlahnya lebih kecil. Uang logam hanya dimanfaatkan dalam lingkup yang lebih kecil, sebagai uang *kembalian* dari transaksi jual beli di warung-warung dan toko-toko, atau untuk acara-acara ritual yang berkaitan dengan uang.

Berdasarkan teori ekonomi, uang dipandang sebagai sesuatu yang anonim secara budaya dan netral secara sosial

(Damsar, 2006:18). Adapun fungsi uang sebagai: alat tukar, satuan hitung, penimbunan kekayaan, dan standar (Sinungan, 1991:5-6). Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Madura, ternyata uang tidak bebas nilai dalam pengertian ekonomi klasik di atas, uang mempunyai fungsi sosial.

Penggunaan uang sehari-hari lebih banyak ke arah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dibandingkan dengan hal yang berkaitan dengan produktivitas, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah bawah. Sumbangan finansial bagi para tetangga atau saudara merupakan ekspresi budaya dari kebiasaan sosial dalam kehidupan orang Madura. Sumbangan sosial ini secara teoretis merupakan rasa *guyub*, yang apabila diamati ternyata sumbangan sosial finansial ini merupakan suatu tindakan yang bersifat timbal balik atau suatu bentuk investasi antar warga. Sumbangan finansial yang diberikan seseorang pada suatu saat akan dikembalikan oleh penerima, dengan jumlah yang sama atau lebih. Bagi masyarakat yang mengingkari cara timbal balik ini akan terkena sanksi sosial berupa bahan pergunjungan tetangga ke arah citra yang negatif. Kebutuhan uang yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Madura berkaitan dengan menengok orang sakit, menyumbang keluarga yang meninggal, menyumbang orang yang punya hajatan, menyumbang kegiatan keagamaan, memberi tips apabila mengurus administrasi di tingkat instansi pemerintah, dan sebagainya.

Pada saat acara pernikahan agak berbeda, karena acara pernikahan selamatannya direncanakan jauh sebelumnya dan melibatkan orang banyak, baik saudara maupun tetangga. Jumlah nominal uang yang disumbangkan cukup besar dibandingkan dengan sumbangan untuk kematian atau kelahiran. Alasannya karena sumbangan pada saat acara pernikahan pada umumnya dicatat oleh yang mengundang, sehingga nominalnya dapat diketahui oleh pengundang.

Orang Madura terkenal karena kereligiusannya. Ciri khas Islam melekat da-

lam budaya berpakaian mereka, seperti kain sarung, songkok, dan baju muslim bagi kaum laki-laki, berkerudung dan pakaian panjang bagi kaum wanitanya.

Pandangan mereka tentang uang yang berkaitan dengan keagamaan tercermin dalam pembagian zakat, terutama zakat fitrah. Beramal dari sebagian rezekinya merupakan salah satu jalan memenuhi rukun Islam. Seseorang yang dianggap kaya, berusaha untuk menyisihkan kekayaannya untuk berzakat. Zakat kadang tidak anonim, ada juga yang lebih suka dibagikan langsung. Zakat fitrah untuk perempuan kadang berupa baju, untuk laki-laki berupa sarung, baju, atau kopiah. Zakat amal diberikan dalam bentuk uang yang dimasukkan dalam amplop tertutup. Jumlah zakat kadang mencapai puluhan jutaan rupiah. Zakat fitrah diantar ke rumah-rumah orang yang dianggap berhak menerimanya. Kadang juga zakat langsung diberikan kepada yang berhak menerima. Menurut beberapa informan, penerima zakat tidak semuanya termasuk ke dalam golongan tidak mampu, pada kenyataannya sering juga seseorang yang dianggap penting oleh pemberi zakat, maka semakin besar nominalnya. Bahkan, seorang kiayi akan menerima lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Bagi orang Madura (pada dasarnya orang Indonesia), naik haji mempunyai makna sosial. Di samping telah menunaikan rukun Islam yang kelima, orang yang telah naik haji akan dipanggil Pak Kaji, dan prestisenya naik. Karena itu, tidak heran bila tujuan hidup orang Madura adalah ibadah haji ke Mekkah.

Acara-acara selamatannya sudah tentu memerlukan banyak biaya. Kebutuhan akan biaya inilah, yang kadang-kadang kurang rasional, maksudnya tidak terlalu memperhitungkan besaran pendapatan dan pengeluaran. Kadang mereka berhutang terlebih dahulu kepada tetangga yang dianggap punya uang, atau kepada rentenir. Untuk menghindari pandangan masyarakat di sekitarnya, maka mereka berusaha untuk mencari utangan, membayar utang urusan nanti. Budaya seperti ini yang mengakibatkan sebagian besar

terbelit dalam utang piutang.

Dalam acara selamat ada yang merasa sebagai hal yang *guyub*, toleransi, dan gotong royong. Dalam ilmu sosial hal ini dinamakan sebagai pertukaran timbal balik atau resiprositas. Resiprositas ini merupakan abstraksi dari proses ekonomi yang kongkrit yang dalam kenyataannya selalu mengandung unsur-unsur yang tercampur tidak murni. Pada umumnya berbeda dalam bentuk pemberian, yaitu yang satu berupa tenaga kerja, yang satunya berupa materi (uang).

Timbal balik biasa terjadi pada pertukaran kebutuhan yang tidak terlalu urgen, seperti pinjam meminjam barang antara tetangga. Timbal balik seimbang, seperti dalam konsep *onjengan*, dan *parloh*, adapun timbal balik yang tidak seimbang adalah ikatan antara orang tidak punya dengan orang kaya, di mana pemberian dari pihak yang kaya pada dasarnya ada unsur politis sepihak. Semua ini berkaitan dengan pemahaman utang dalam konteks sosial.

Adapun utang dalam bentuk utang piutang materi atau uang, diusahakan tidak diketahui oleh orang lain, karena seseorang merasa malu apabila utangnya diketahui oleh orang lain. Mereka berusaha untuk menutupi utang piutang ini agar tidak dianggap orang miskin. Pada umumnya kelas menengah bawah masih sering berhubungan dengan para rentenir, sementara masyarakat di perkotaan sudah mulai berpikir rasional atau meleak keuangan.

Bantuan atau pinjaman dari pemerintah untuk membantu orang-orang miskin di desa juga dimaknai lain, karena mereka beranggapan bahwa bantuan ini merupakan hibah, jadi tidak usah dibayar. Dengan demikian pandangan seperti ini perlu diubah. Ada beberapa instansi simpan pinjam yang dibentuk oleh anggota masyarakat sendiri yang dapat bertahan dan dapat berjalan dengan baik, seperti Mitra Bahari di Desa Kilensari. Lembaga simpan pinjam ini dapat berkembang karena ada unsur pengelolaan yang profesional sekaligus berdasarkan kearifan loka, lembaga ekonomi ini bersifat ekonomi

dan sosial, sehingga dapat dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga untuk modal usaha mereka. Lembaga ini berhasil mengajak masyarakat sekitar meleak keuangan. Budaya pinjam masyarakat terhadap lembaga keuangan modern sedikit demi sedikit mengubah paradigma bunga pinjaman, walaupun secara umum belum dapat menghapus sistem kredit tradisional secara menyeluruh.

Berbeda dengan rentenir yang tetap dapat eksis di pedesaan karena ada faktor budaya yang dapat melanggengkan aktivitas kredit tradisional ini. Secara sosiologis, hubungan sosial antara kreditor (rentenir) dengan peminjam (nasabah) berjalan dengan akrab atau tidak menimbulkan permusuhan, kecuali apabila terjadi mangkir membayar. Hubungan personal antara nasabah dengan rentenir mempermudah nasabah meminjam uang tanpa anggungan dalam transaksi pinjam meminjam, uang mudah diberikan tanpa harus melengkapi administrasi yang dianggap menyulitkan, serta adanya saling kepercayaan. Masyarakat menganggap pinjam di bank sangat rumit, karena hubungan bersifat impersonal dengan aturan-aturan yang dianggap menyulitkan, walaupun bunga yang diterapkan rendah.

Konsepsi Kultural Etnis Jawa tentang Uang dan Utang

Dalam upaya melakukan pemahaman terhadap situasi sosial budaya suatu masyarakat, terlebih dahulu perlu dijabarkan tentang suatu fakta bahwa Suku Jawa tidak merupakan sebagai suatu kesatuan suku bangsa yang semuanya bersifat homogen. Apabila dikaji lebih dalam, maka masyarakat Jawa memiliki sifat kemajemukannya, yang ditandai oleh adanya sub groups. Tiap kelompok memiliki sistem budayanya sendiri yang bersifat khas sehingga dalam kebudayaan Jawa terdapat sub-sub kebudayaan atau *subcultures*. Secara fakta, suku Jawa terkesan ada keanekaragaman budaya Jawa yang besar. Akan tetapi, di balik keanekaragaman itu, ada unsur yang memberi identitas budaya Jawa. Jadi dasar dari sistem budaya yang memberi identitas kelompok atau

sub grup adalah sub kultur yang merupakan varian budaya Jawa itu sendiri.

Nilai-nilai budaya Jawa yang relevan dengan permasalahan uang dan utang, berkaitan dengan, *rukun*, *sungkan*, *medit* (pelit), kuasa (kekuasaan), *sambat sinambat* yang dalam hal-hal tertentu berbaur dengan sikap *nrima* yang fatalistik. Uang dapat menciptakan perasaan inferior juga superior pada diri individu, sehingga memiliki uang merupakan dambaan setiap individu.

Fenomena laku dan *bonten laku* (tidak laku) tentang uang di pasaran tidak hanya terkait dengan otoritas perbankan, tetapi juga terkait dengan otoritas sosial budaya masyarakat. Bagaimana masyarakat memaknai uang, kata *bonten laku* bukan berarti menafikan otoritas perbankan karena pecahan lain diterima, melainkan aktor sosial memasukkan otoritas sosial budaya yang dimilikinya dalam melakukan transaksi. Dengan demikian, otoritas perbankan telah ditumpangi oleh otoritas sosial budaya dalam menentukan keberlakuan uang dalam masyarakat tertentu.

Orang-orang di desa selalu mengadakan selamatan, terutama pada bulan-bulan yang cocok untuk melangsungkan selamatan. Selamatan dilaksanakan berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, dan pada saat memperingati hari-hari besar keagamaan. Selamatan diadakan oleh perorangan yang selalu melibatkan orang lain dalam hal ini tetangga dekat serta saudara yang tinggal didekatnya. Persiapan selamatan memakan waktu sehari-hari, walaupun acara selamatannya berlangsung dalam beberapa jam saja. Pada prinsipnya, selamatan dilaksanakan untuk memohon berkat dari Allah.

Uang sangat diperlukan oleh masyarakat, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup juga untuk mencukupi keperluan lain yang berkaitan dengan hubungan sosial. Uang tidak berdiri sendiri. Pengeluaran untuk hal-hal tak terduga yang berkaitan dengan hubungan sosial terutama di pedesaan lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan masyarakat

kota. Sumbangan yang sering diberikan selain dalam cara pernikahan adalah melayat yang sakit, meninggal, melahirkan, acara sunatan, hajian, dan sebagainya.

Selamatan merupakan acara ritual yang diungkapkan dengan praktek makan bersama (*slamet*) yang menegaskan komunalitas peserta dalam usaha menciptakan keberadaan yang damai (*slamet*) di dunia yang penuh bahaya ini. Pada tingkat interaksi komunal yang lebih horizontal, hidup harus ditandai dengan hubungan yang harmonis (*rukun*). Pada dasarnya hubungan ini disusun secara diadik dalam sebuah struktur kewajiban timbal balik yang mengikat individu satu sama lainnya. Penerimaan orang lain bersifat pragmatik, orang membutuhkan orang lain dalam hidup ini, oleh karena itu ia harus bekerja sama dan memenuhi harapan satu sama lainnya. Dengan menjaga hubungan yang teratur, tiap orang memperbesar kesempatannya memperoleh hidup yang tenang sambil tetap terpenuhi kebutuhan hidupnya (Mulder, 1999:193).

Scott (1976) mengatakan bahwa sumbangan finansial yang diberikan oleh seseorang untuk orang lain dapat dipandang sebagai bentuk jaminan sosial (*social insurance*). Dengan adanya lembaga sosial seperti ini, yaitu memberikan kontribusi kepada orang yang tengah mengalami keadaan situasi tertentu, maka mereka tercatat sebagai salah seorang yang menjadi penerima bantuan dari orang yang menerima sumbangan. Jaringan hubungan dari jaminan sosial ini terus menerus diinterpretasikan selama proses interaksi dilangsungkan. Besar kecilnya uang yang diberikan tidak terkait dengan kemampuan ekonomi yang bersangkutan, tetapi juga dipengaruhi interpretasi jaringan sosial yang dilangsungkan.

Struktur sosial masyarakat Jawa dewasa ini, belum dapat melepaskan diri dari simbol-simbol kebesaran masa lalu, terutama masyarakat tradisional. Hal-hal yang berkaitan dengan budaya *adiluhung* masih melekat erat dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa. Ide budaya yang berkaitan dengan kesetiaan, kepemilikan finansial, serta tindakan yang gagah masih

mempengaruhi masyarakat Indonesia dewasa ini, khususnya masyarakat Jawa. Dalam realitas sosial, hubungan atasan dan bawahan atau pemimpin dan pengikutnya diikat oleh hubungan kesetiaan dan perlindungan yang tidak jauh dari kebutuhan akan kenyamanan bagi bawahan, dan kemampuan finansial dari atasan untuk menjaga kesetiaan dan kenyamanan bawahan. Istilah *Dhuwit iku kuwoso*, yang artinya uang itu memiliki kekuasaan berkaitan dengan akumulasi dan distribusi kekayaan yang sekarang wujudnya adalah uang. Seberapa besar kekuasaan uang disimbulkan dalam seberapa besar numerik yang tercetak dalam uang tersebut. Semakin tinggi angka numeriknya semakin tinggi pula kekuasaan uangnya. Dengan kata lain semakin banyak seseorang memiliki uang maka semakin tinggi kekuasaan riilnya yang ada dalam genggamannya. Maka uang yang dimiliki oleh seseorang merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tersebut (Nugroho, 2000:237).

Pertumbuhan ekonomi yang sedemikian rupa dewasa ini di pedesaan, tidak hanya mengubah tingkat ekonomi dan sosial, tetapi juga mengubah nilai-nilai atau norma-norma. Sebelumnya terkait dengan nilai dan norma ideal yang berkaitan dengan nilai keagamaan, budaya, dan sosial, sekarang norma-norma tersebut diganti oleh norma-norma yang kasat mata atau materi (uang).

Dapat dikatakan bahwa masyarakat masih terbelah memahami penggunaan uang sebagai instrumen politis. Ada masyarakat yang menolak pandangan bahwa uang sebagai media untuk memahami kehidupan sosial. Nilai moral uang berkaitan dengan sosial, jika uang digunakan untuk menghadapi semua bentuk aktivitas ekonomi, tidak lebih tidak kurang. Korupsi merupakan pandangan atau konotasi negatif uang dalam masyarakat tradisional (Nugroho, 2000:97). Dari sini masih ada ruang untuk mendiskusikan hubungan antara norma dan uang sebagai sebuah realitas sosial.

Sistem sosial yang masih kuat di negara Indonesia seperti tolong menolong tetap harus dipertahankan, sehingga

masyarakat tidak terbawa arus penyalahgunaan uang ke arah konsumtif yang tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Uang penting untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi, tetapi juga uang seharusnya tidak menderteminasi seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain uang punya fungsi ekonomi dan sosial. Fungsi ekonomi uang untuk membeli sesuatu atau kebutuhan hidup. Fungsi sosial uang, merupakan ekspresi budaya dan kebiasaan sosial sebagai bentuk pertukaran, dalam bahasa mereka adalah sumbangan. Seseorang yang tidak mengikuti kebiasaan masyarakat setempat dalam aturan sumbang menyumbang akan menjadi bahan pergunjungan negatif dari para tetangga. Sebutan terhadap orang yang tidak ikut dalam aktivitas sumbang menyumbang dalam masyarakat akan mendapat sanksi sosial, berupa pengucilan karena dianggap orang yang tidak mau *guyub* (nilai rukun) dengan tetangga, sombong, bahkan *medit* (pelit).

Hubungan sosial dalam masyarakat Jawa sudah terinternalisasi sejak kecil. Tatanan dalam masyarakat mencakup suatu sistem hubungan heirakhis antara kedudukan-kedudukan moral yang tak sederajat, dalam mana tiap kedudukan mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Sistem hubungan harus *laras*, harmonis, dan *rukun* (Mulder, 1999:23). Hidup rukun adalah cara untuk menciptakan relasi yang harmonis di antara orang-orang yang dekat yang tidak harus intim/akrab, tetapi cukup dekat untuk harus hidup bersama satu sama lainnya. Ada penekanan untuk *rukun* yang sangat diperlukan untuk bertahan hidup, untuk hidup bersama, saling berbagi, pinjam meminjam, dan sebagainya. Dengan kata lain, penekanan ini melancarkan roda sistem kewajiban yang saling berkaitan dari hubungan-hubungan antar manusia (Mulder, 1999:234).

SIMPULAN

Bagi masyarakat di pedesaan baik yang

berasal dari suku Jawa maupun Madura, memandang uang sebagai alat tukar menukar, alat bayar, atau komoditi yang dapat diperjualbelikan, juga sebagai simbol kebersamaan melalui lembaga tradisional gotong royong, investasi tradisional (tukar menukar), religi, dan status sosial, dan kewajiban sosial lainnya. Jadi, uang difahami sebagai alat untuk kelancaran kegiatan ekonomi, hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan sang pencipta, jadi berfungsi sebagai jalinan hubungan baik secara vertikal dan horizontal. Dalam hal ini uang mendapatkan makna sosial yang kadang-kadang melebihi makna atau fungsi-fungsi ekonomi. Dari sudut antropologi dan sosiologi, uang dipahami sebagai alat untuk menyelenggarakan acara selamatan, keagamaan, dan kompensasi untuk membebaskan seseorang dari kewajiban sosial, serta ada unsur politik untuk mempengaruhi seseorang. Jadi uang sangat berpengaruh bagi realitas ekonomi dan juga bidang kehidupan sosial lainnya. Penggunaan uang dibimbing oleh nilai-nilai tradisi budaya serta maksud dari pengguna uang itu sendiri. Uang cenderung digunakan untuk tujuan praktis, belum dijadikan tujuan jangka panjang, sehingga budaya menabung masih sangat asing bagi masyarakat terutama di pedesaan.

Utang adalah gejala pinjam meminjam uang yang tidak perlu diketahui oleh siapapun, hanya peminjam dan yang memberi pinjaman. Pada umumnya mereka berutang untuk memenuhi kebutuhan dasar (konsumsi), serta untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti uang pendidikan, barang mewah, dan sebagainya. Penggunaan utang tidak didasarkan oleh kebutuhan utama, akan tetapi juga diikuti oleh kepentingan pribadi si peminjam. Alasan berutang bermacam-macam, di pedesaan alasan kebutuhan ekonomi dan sosial sangat dominan. Utang dilakukan oleh masyarakat pada saat terjadi musim undangan, dan meningkat pada masa anak-anak membutuhkan biaya pendidikan, serta pada hari-hari besar Islam (hari raya). Selain itu,

pada umumnya warga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan serta gengsi sosial melalui utang. Masyarakat kota cenderung lebih personal dalam utang berutang, karena fasilitas utang dapat dilakukan secara pribadi melalui instansi atau lembaga keuangan baik swasta maupun pemerintah. Alasan berutang pun beragam, dari mulai kebutuhan untuk pendidikan anak-anak, sampai barang konsumtif, bahkan sebagai gaya hidup masyarakat kota yang sedang menjamur dewasa ini dengan jalam membeli barang mewah melalui kredit.

Utang bagi masyarakat pedesaan belum dipahami sebagai kredit produktif, tetapi cenderung sebagai pinjaman untuk bertahan hidup, sehingga utang masih diamsusikan untuk peminjaman sesaat. Aktivitas perkreditan secara tradisional masih berlangsung secara aktif di pedesaan. Pada umumnya masyarakat desa pun sudah paham bahwa kredit tradisional bunganya tinggi. Akan tetapi, masyarakat belum dapat menghindari atau mencari solusi yang menguntungkan karena kurangnya sosialisasi perkreditan dari pihak yang berwenang mengenai perkreditan. Kredit dari pemerintah masih dimaknai sebagai hibah, sehingga pemahamannya adalah tidak usah melunasi utang piutang kepada lembaga resmi pemerintah yang memberikan pinjaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kajian ini merupakan bagian dari penelitian dengan judul “Berkayuh Di antara Dua Arus: Persepsi Masyarakat Madura dan Jawa tentang Uang, Utang, dan Kredit” yang dilaksanakan berdasarkan dana DP2M Universitas Jember tahun anggaran 2014 dan 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka. 1983. *Antropologi Sosial dalam Pembangunan*. Bandung: Transito.
- Agusta, Ivanovich. 2015. “Membalik Pendamping Desa”. *Kompas*. 4 Mei 2015.

- Besseling, O.P. 1919. *Het Nederlandsch Indisch Volkscredietwezen*. S'Gravenhage: Hollandia_Drukkerij.
- Boeke, J.H. D.H. 1926. "Inlansche Budgetten", *Koloniale Studien*. Tiende Jaargang.
- Cramer, J.C.W. 1929. *Het Volkscredietwezen in Nederlandsche*. Weltevreden: G.Kolff.
- Creutberg, Pieter dan J.T.N .van Laanen. ! 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Damsar. 2006. *Sosiologi Uang. Padang*. Padang: Andalas University Press.
- Djoyohadikusumo, Sumitro.1989. *Kredit Rakyat di Masa Depresi*. Jakarta:LP3ES.
- Geertz, Clifford. 1987. "Perkumpulan Kredit Bergilir Tahap Menengah dalam Pembangunan". Dalam J. Colletta dan Umar Kayam (Ed). *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Geertz, Clifford. 1989. *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Gottshclak, L. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1986. *Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Mulder, Neils. 1999. *Sikap Hidup Orang Jawa*. Jakarta: LP3ES.
- Nogroho, Heru. 2002. *Uang, Rentenir dan Utang Piutang*. Yogyakarta. Yayasan Pelajar.
- Reid, Anthony.1993. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta:Yayasan Obor.
- Scoot, James. 1994. *Moral Ekonomi Petani. Pergerakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: YOI.
- Svenson, Thommy. 1989. "The Making of the Local Colonial State in Historical Prepektive : Urang Belanda, Menak and Bumi in Priangan Since 1870." *Paper for Confrence*. Wasesnar: Netherland Institute for Advence Studies.
- Zed, Mestika.2002. "Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial Akhir". Dalam J. Thomas Lindblad (Ed). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dengan Pustaka Pelajar.